

**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**



**PADANG PANJANG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan perubahan “Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Padang Panjang melalui bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah mutlak dilakukan untuk menjadi pedoman dalam bekerja guna tercapainya cita-cita pembangunan dalam rentang waktu satu tahun ke depan. Karena itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui iklim investasi yang kondusif , Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu, tenaga kerja yang maju, mandiri dan islami”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Padang Panjang, Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

**EWASOSKA,SH**  
**NIP.19750103 200003 1 003**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, merupakan salah satu amanat tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengandung makna bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan yang cepat dengan diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tersebut diatas. Saat ini diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan pencapaian hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan harapan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, diperlukan undang-undang tentang Pelayanan Publik yang berkaitan dengan terselenggaranya pelayanan publik sebagai salah satu penopang terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan, legitimit sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dapat berjalan secara efektif, efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesadaran akan perlunya suatu pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN ini menuntut perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari pemerintahan yang berorientasi pada kekuasaan kepada manajemen pemerintahan yang berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat. Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan ini menempatkan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terprogram, terarah dan sistematis serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya yang perlu disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Pendek, dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang Panjang serta dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dituangkan dalam bentuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja oleh Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang yang penyusunannya mengaju kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah/Jangka Panjang Kota Padang Panjang.

Perubahan Rencana kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk satu ( 1 ) Tahun Anggaran, yang berisikan penjabaran dari visi, misi, Prioritas dan Sasaran pembangunan untuk Tahun 2018. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Padang Panjang disusun dengan melibatkan semua pihak terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang disertai sebagian kewenangan oleh Walikota untuk

menangani Penyelenggaraan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Adapun landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
14. Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah :

1. Sebagai upaya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan penyusunan prioritas serta sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
2. Merumuskan prioritas dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018.
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

### **1.2. Landasan Hukum**

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.4. Sistematika Penulisan**

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)**

## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Program dan Kegiatan**

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN**

### **RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tahun lalu (tahun 2017) pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



**TABEL 2.1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usuran/Bidang non pelayanan dasar									
	Bidang urusan DPMPSTP									
	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>445.529.300</b>	<b>428.347.229</b>	<b>721.219.050</b>	<b>645.122.426</b>		<b>712.252.000</b>		
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	<b>Outcome</b> Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat disediakan untuk 1 tahun	990.000	747.000	1.800.000	1.800.000	1	1.350.000		
		<b>Output</b> Tersedianya perangko, materai 3000 dan 6000 untuk 1 tahun								



				<b>Output</b> Tersedianya dana jasa penjaga malam dan jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan							
			Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	<b>Out come</b> Persentase terselenggaranya aktifitas kantor dan pelayanan terhadap masyarakat	30.860.000	30.829.145	34.075.000	33.822.500	1	28.000.000	
				<b>Output</b> Tersedianya alat tulis untuk 1 th							
			Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	<b>Out come</b> Persentase lancarnya pelayanan atas ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	41.119.000	37.405.000	58.180.000	39.928.600	1	61.500.000	
				<b>Output</b> Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun							
			Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Out come</b> Persentase penerangan kantor dan komponen listrik terpenuhi 100%	6.062.300	6.034.800	6.151.650	6.105.000	1	7.000.000	
				<b>Output</b> Tersedianya kebutuhan penerangan kantor untuk komponen listrik							

					selama 1 th							
				Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	<b>Out come</b> Persentase pelaksanaan rapat berjalan dengan baik 100%	7.290.000	7.157.700	10.010.000	9.310.400	1	19.600.000	
				<b>Output</b> Jumlah biaya makanan dan minuman tersedia sebanyak 12 bulan								
				Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<b>Outcome</b> Presentase Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	97.150.000	96.307.140	275.000.000	271.531.709	1	365.000.000	
				<b>Output</b> Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah untuk 1 Tahun								
				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>213.370.000</b>	<b>212.225.000</b>	<b>403.450.323</b>	<b>367.613.600</b>		<b>92.650.000</b>	
				Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Out come</b> Persentase lancarnya kegiatan kantor	8.000.000	8.000.000	87.160.000	79.430.000	1	18.000.000	
				<b>Output</b> Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor								



				<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		10.500.000	10.250.000	27.500.000	27.250.000		50.000.000		
				Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	<b>Out come</b> Terselenggaranya aparatur untuk menambah wawasannya	10.500.000	10.250.000	27.500.000	27.250.000	1	50.000.000		
					<b>Output</b> Tersedianya biaya aparatur untuk mengikuti bintek sebanyak 15 orang								
				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		328.000	328.000	328.000	328.000		328.000		
				Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PERANGKAT DAERAH	<b>Out come</b> Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja 100%	82.000	82.000	82.000	82.000	1	82.000		
					<b>Output</b> Terlaksananya pembuatan laporan sebanyak 16 buah								
				Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	<b>Out come</b> Persentase penyusunan laporan keuangan semesteran 100%	82.000	82.000	82.000	82.000	1	82.000		
					<b>Output</b> Terlaksananya laporan keuangan semesteran sebanyak								

				Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Out come Persentase penyusunan laporan keuangan prognosis	82.000	82.000	82.000	82.000	1	82.000		
				Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output Terlaksananya laporan keuangan prognosis sebanyak 1 laporan								
				Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Outcome Persentase penyusunan laporan akhir tahun 100%	82.000	82.000	82.000	82.000	1	82.000		
				Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan								
				<b>Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan/pelayanan sistem informasi terpadu</b>		<b>297.715.000</b>	<b>290.252.900</b>	<b>117.183.500</b>	<b>94.239.775</b>		<b>Rp -</b>		
				Kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan terpadu	Outcome Persentase sosialisasi pelayanan perzinan terpadu	42.680.000	42.680.000	Rp -	Rp -	-			
				Kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan terpadu	Output Persentase pelaksanaan sosialisasi pelayanan terpadu kota padang panjang								
				Kegiatan pengembangan sistim informasi pelayanan perizinan	Outcome Persentase sistim informasi pelayanan perizinan	155.600.000	148.787.900	Rp -	Rp -	-			

					Output Persentase pelaksanaan pengembangan sistim informasi pelayanan perizinan								
				Pengawasan dan evaluasi perizinan dan non perizinan	Outcome Terlaksananya pengawasan dan evaluasi perizinan	Rp -	Rp -	48.400.000	46.582.000	1			
					Output Terlaksananya pengawasan dan evaluasi perizinan dan non perizinan								
				Kegiatan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu Kegiatan bimtek pelatihan konfigurasi dan pemanfaatan sicantik	Outcome Persentase percepatan pelayanan perzinan dikeluarkan	Rp -	Rp -	27.883.500	10.596.775	0			
					Output Terbentuknya sistim jaringan unit pelayanan sebanyak 1 paket Terlaksananya bimtek pelatihan konfigurasi dan pemanfaatan sicantik								
				Peningkatan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka percepatan penerbitan	Outcome Persentase peningkatan koordinasi tim teknis dalam rangka percepatan penerbitan	Rp -	Rp -	40.900.000	37.061.000	1			
					Output Terlaksanya koordinasi dengan tim teknis dalam rangka percepatan penerbitan								



				Kegiatan peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Outcome Persentase peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	99.435.000	98.785.000	Rp -	Rp -	-		
				Kegiatan peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Output Tersedianya standar pelayanan sesuai dengan standar ISO							
				<b>Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>		Rp -	Rp -	250.000.000	245.170.926		518.850.000	
				Kegiatan penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Outcome Persentase penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Rp -	Rp -	250.000.000	245.170.926	1		
				Kegiatan penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Output Meningkatnya investasi di padang panjang							
				Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Outcome persentase penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	209.050.000	
				Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Output terlaksananya kajian mengenai studi kelayakan tentang listrik tenaga mikro hidro, plts, rooftop dan pengelolaan sampah di kota padang panjang							

					Outcome persentase Kajian kebijakan penanaman modal								
				Kajian kebijakan penanaman modal	Output terlaksananya kajian mengenai rancangan Perda tentang kemudahan investasi dan insentif penanaman modal di kota padang panjang	Rp -						-	109.800.000
					Outcome persentase Pelaksanaan audit pasar sayur bukit surungan								
				Pelaksanaan audit pasar sayur bukit surungan	Output terlaksananya apraisal pasar sayur bukit surungan dan terfasilitasinya akuntan publik dalam melaksanakan audit	Rp -						-	200.000.000
				<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>		Rp -	Rp -	304.740.000	258.407.123				221.275.000
				Kegiatan peningkatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Outcome peningkatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rp -	Rp -	27.390.000	22.093.500		1		Rp -

					Output Terlaksanya monitoring dan evaluasi penanaman modal								
					Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	Outcome Persentase penyelenggaraan pameran investasi	Rp -	Rp -	277.350.000	236.313.623	1	221.275.000	
						Output Terlaksanya pameran investasi di luar daerah							
					<b>Program pendidikan kualitas dan produktifitas tenaga kerja</b>		Rp -	Rp -	111.415.900	106.979.740		245.532.500	
					Kegiatan penyusunan database tenaga kerja daerah	Outcom persentase penyusunan database tenaga kerja daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	113.690.000	
						Output terlaksananya penyusunan database tenaga kerja daerah							
					Kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja/masyarakat	Outcome Persentase pendidikan, pelatihan, Kewirausahaan bagi pencari kerja	Rp -	Rp -	28.490.500	27.674.440	1	36.992.500	
						Output Terlaksananya diklat peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi pencari kerja dan masyarakat							

				Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Outcome Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Rp -	Rp -	82.925.400	79.305.300	1	94.850.000		
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Output Terlaksananya diklat keterampilan bagi pencari kerja								
				<b>Program peningkatan kesempatan kerja</b>		Rp -	Rp -	63.575.000	43.848.000		48.725.000		
				Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Outcome Persentase penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Rp -	Rp -	63.575.000	43.848.000	1	48.725.000		
				Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Output Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa kerja								
				<b>Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagkerjaan</b>		Rp -	Rp -	50.050.000	20.575.000		Rp -		
				Kegiatan pelaksanaan penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Output Persentase pelaksanaan penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Rp -	Rp -	50.050.000	20.575.000	0			
				Kegiatan pelaksanaan penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Output Teresolisasinya peraturan ketenagkerjaan dan survey kebutuhan hidup layak 1 dokumen 1 tahun								



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat berorientasi kepada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang telah disepakati bersama dan berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan menggambarkan bahwa pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sudah dapat dikategorikan BAIK dan keadaan ini akan diupayakan peningkatannya setiap tahun sehingga harapan kita untuk mendapatkan ISO 9001 dapat tercapai.



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

### 1. Hal-hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan dan harus ditindaklanjuti yaitu :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- b. Belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis/ Instansi terkait.
- c. Masyarakat/ pelaku usaha masih enggan untuk pengurusan perizinan.
- d. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang pengurusan perizinan dan non perizinan.
- e. Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah terkait didalam menjalankan dan menegakkan Perda.
- f. Pelaku usaha masih melaksanakan pengurusan perizinan dengan mengatasnamakan pejabat daerah , tidak mau melalui prosedur perizinan.
- g. Masih Rendah SDM Aparatur dalam mengadopsi dan menjalankan jaringan / mengakses aplikasi Teknologi Informasi didalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan publik.
- h. Belum adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif untuk sebuah pelayanan yang profesional.
- i. Belum adanya komitmen yang jelas dari pimpinan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Etalasnya Daerah.

### 2. Permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi

Tidak terlepas dari hal-hal kritis sebagaimana tersebut diatas,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam operasionalnya menghadapi permasalahan dan hambatan yang mencakup :

- a. Kurang tertatanya administrasi perizinan dan non perizinan



- b. Keterbatasan kemampuan SDM
  - c. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi.
  - d. Belum optimalnya koordinasi dan peranan masing-masing Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis dalam pelayanan perizinan.
3. Tantangan dan Peluang dalam peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam operasionalnya ditantang untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat merubah image masyarakat terhadap pelayanan yang berbelit belit serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi tantangan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan :
- a. Penataan adminstrasi perizinan dan non perizinan
  - b. Menata sistem pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan IT
  - c. Meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan, worshop, Bimtek bidang pelayanan publik, Teknologi Informasi.
  - d. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses perizinan dan non perizinan .
  - e. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dengan memahami tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah, dan menyatukan kebulatan tekak bahwa pelayanan publik harus diprioritaskan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Program dan Kegiatan

Untuk dapat meningkat dan tercapainya mutu pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan kebulatan tekad (komitmen) Pemerintah Kota Padang Panjang dan Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis didalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sangat diperlukan 8 program dan 29 kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

##### I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tidak ada perubahan Rp. 1.350.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, bertambah sebesar Rp 12.000.000,- ( 66,67 %) karena pembayaran internet untuk 6 bulan kedepan Juli s/d Desember 2018.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, bertambah Rp. 43.142.200,- ( 46.66 %) Dana ini digunakan untuk gaji 2 orang sopir .
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, berkurang Rp. 5.331.000,- ( -4,97 % ) untuk dana restribusi sampah Rp.300.000,- karena dan restribusi sampah sudah melekat pada tagihan air dan dana premi asuransi kesehatan dikurangi sebesar Rp 5.031.000,- karena .....
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, tidak ada perubahan Rp. 28.000.000,-

- |   |                  |
|---|------------------|
| 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berkurang 29,27 %                             | Rp. 18.000.000,- |
| 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, tidak ada perubahan | Rp. 7.000.000,-  |
| 8. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak ada perubahan                                    | Rp. 19.600.000,- |
| 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, bertambah 13,70 %                | Rp. 50.000.000,- |

**II. Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, bertambah 366,94 %                  | Rp. 66.050.000,- |
| 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, bertambah 16,76 %             | Rp. 10.000.000,- |
| 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor, tidak ada perubahan | Rp. 10.000.000,- |
| 4. Pensertifikatan tanah pemerintah daerah, Rp. 5.000.000,-                  |                  |
| 5. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional, bertambah 100 %                   | Rp. 87.350.000,- |

**III. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada perubahan | Rp. 50.000.000,- |
|--|------------------|

**IV. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, tidak ada perubahan | Rp. 82.000,- |
| 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, tidak ada perubahan                               | Rp. 82.000,- |
| 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, tidak ada perubahan                      | Rp. 82.000,- |

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, tidak ada perubahan Rp. 82.000,-

**V. Program: Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

1. Penyusunan data base, tidak ada perubahan Rp. 113.690.000,-
2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja/masyarakat, berkurang 3,65 % Rp. 1.350.000,-
3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, berkurang 7,06 % Rp. 6.700.000,-

**VI. Program: Peningkatan kesempatan Kerja**

1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, berkurang 5,85 % Rp. 2.850.000,-
2. Penyusunan rencana tenaga kerja daerah, bertambah 100 % Rp. 12.134.000,-

**VII. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.**

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi, bertambah 11,75 % Rp. 26.000.000,-

**VIII. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur, bertambah 2.03 % Rp. 4.250.000,-
2. Kajian Penanaman Modal, berkurang 1,71 % Rp. 1.875.000,-
3. Pelaksanaan audit pasar sayur bukit surungan ditiadakan karena tujuan kegiatan ini adalah untuk menghitung / menaksir asset pasar sayur bukit surungan kota Padang Panjang, dianggap nilai biaya yang dikeluarkan terlalu besar yaitu Rp. 200.000.000,- oleh sebab itu kegiatan ini disesuaikan dengan tujuan semula yaitu appraisal/ inventarisasi pasar sayur Bukit Surungan dengan biaya yang jauh lebih sedikit yaitu Rp. 55.350.000,-
4. Pelaksanaan inventarisasi investasi pasar sayur, bertambah 100 % Rp. 55.350.000,-  
Kegiatan ini pengganti dari pelaksanaan audit pasar sayur Bukit Surungan

*Tabel 3.1 di PERUBAHAN RKA 2018.....*

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1	2	3	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			4	5	6	7		9	10
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>DPM PTSP</b>		<b>768.438.000</b>	<b>APBD</b>			845.281.800
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk keperluan administrasi keuangan	DPM PTSP	2 jenis	1.800.000	APBD		2 jenis	1.980.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon, fax imili dan internet	DPM PTSP	12 bulan	18.600.000	APBD		12 bulan	20.460.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	DPMP TSP	9 buah	140.846.000	APBD		9 buah	154.930.600

		dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honor, THR dan tersedianya pakaian dinas petugas kebersihan dan penjaga malam	DPMP TSP	4 orang	119.342.000	APBD		4 orang	131.276.200
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPMP TSP	100%	30.000.000	APBD		100%	33.000.000
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DPMP TSP	1 tahun	66.250.000	APBD		1 tahun	72.875.000
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	DPMP TSP	1 tahun	7.000.000	APBD		1 tahun	7.700.000
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat	DPMP TSP	12 bulan	19.600.000	APBD		12 bulan	21.560.000
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi konsultasi ke luar daerah	DPMP TSP	12 bulan	365.000.000	APBD		12 bulan	401.500.000
		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.209.184.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.330.102.400</b>

		Kegiatan pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	DPMP TSP	1 paket	999.834.000	APBD		-	-
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DPMP TSP	13 jenis	140.350.000	APBD		13 jenis	154.385.000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	DPMP TSP	1 tahun	59.000.000	APBD		1 tahun	64.900.000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	DPMP TSP	1 tahun	10.000.000	APBD		1 tahun	11.000.000
		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>49.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>53.900.000</b>
		Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	DPMP TSP	25 Orang	49.000.000	APBD		25 Orang	53.900.000
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>DPMP TSP</b>		<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>55.000.000</b>
		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkirimnya aparat DPMP TSP untuk mengikuti Bimtek dan pelatihan	DPMP TSP	1 tahun	50.000.000	APBD		1 tahun	55.000.000
		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>		<b>DPMP TSP</b>		<b>158.092.500</b>	<b>APBD</b>			<b>227.499.250</b>



		Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja	Teerlaksananya pelatihan bagi pencari kerja	DPMP TSP	20 orang	43.242.500	APBD		20 orang	47.566.750
		Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja/ masyarakat	Terlaksananya pendidikan pelatihan kewirausahaan	DPMP TSP	25 orang	114.850.000	APBD		25 orang	126.335.000
		<b>Program peningkatan kesempatan Kerja</b>		DPMP TSP		<b>133.300.000</b>	APBD			<b>150.197.500</b>
		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait penempatan tenaga kerja	DPMP TSP	1 paket	48.725.000	APBD		1 paket	53.597.500
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Buku perencanaan Tenaga Kerja Daerah	DPMP TSP	50 buku	84.575.000	APBD		50 buku	96.600.000
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>DPMP TSP</b>		<b>490.775.000</b>	<b>APBD</b>			<b>539.852.500</b>

			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya promosi ke luar daerah	DPMP TSP	2 kali	290.000.000	APBD		2 kali	319.000.000
			Penyelenggaraan temu bisnis	Tersebarnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi serta adanya minat calon investor untuk berinvestasi di Kota Padang Panjang	DPMP TSP	1 paket	200.775.000	APBD		1 paket	220.852.500
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>DPMP TSP</b>		<b>97.849.000</b>	<b>APBD</b>			<b>107.633.900</b>
			Kegiatan inventarisasi tanah ulayat	Terlaksananya inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk investasi penanaman modal	DPMP TSP	1 paket	97.849.000	APBD		1 paket	107.633.900
			<b>Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan/ pelayanan sistim informasi terpadu</b>		<b>DPMP TSP</b>		<b>218.472.500</b>	<b>APBD</b>			<b>222.957.350</b>
			Kegiatan penyusunan buku profil pelayanan perizinan	Terlaksananya penyusunan buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan	DPMP TSP	150 buku	39.042.000	APBD		150 buku	42.946.200

		Kegiatan penyusunan SP dan SOP perizinan dan non perizinan	Terlaksananya penyusunan SP dan SOP perizinan dan non perizinan	DPMP TSP	50 buku	13.784.000	APBD		50 buku	15.162.400
		Kegiatan Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Terlaksananya kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat dan tersedianya buku survey	DPMP TSP	100 buku	15,784,000	APBD		100 buku	17,362,400
		Kegiatan pengembangan infrastruktur aplikaisi cantik	Terlaksananya pengembangan infrastruktur aplikasi si cantik	DPMP TSP	10 modul	70.361.000	APBD		10 modul	77.397.100
		Kegiatan sosialisasi peraturan dibidang perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha	Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha	DPMP TSP	1 kali	24.145.500	APBD		1 kali	26.560.050
		Kegiatan workshop penerapan sistim terpadu melaluim aplikaisi SIPIPISE (sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik)	Terlaksananya workshop penerapan sistem terpadu	DPMP TSP	1 kali	55.356.000	APBD		1 kali	60.891.600

1.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat mengakomodir semua kebutuhan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan serta tercapainya visi misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan 8 program 29 kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang nantinya terdapatnya beberapa kegiatan yang merupakan kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan dan merupakan salah satu kegiatan pendukung prioritas daerah yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain kegiatan:

1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 ini.

